

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA JASA TENAGA AHLI TEKNOLOGI DAN INFORMASI I/T DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengelolaan pemerintahan, pengambilan keputusan secara tepat sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian langkah dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk mencapai suatu keputusan yang tepat dibutuhkan informasi yang tepat pula, selain itu informasi yang disajikan juga harus memiliki tingkat kehandalan, kecepatan dan keakuratan yang tinggi. Dengan perkembangan situasi yang saat ini tengah dihadapi oleh pemerintah, maka ketepatan dalam pengambilan keputusan akan menjadi hal yang sangat strategis guna menghadapi setiap tantangan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan layanan informasi pemerintahan yang dapat dengan sangat cepat, tepat, akurat dan handal memberikan setiap informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan.

Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oleh karena itu, peningkatan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi salah perhatian pemerintah daerah yang prioritas. Tantangan saat ini adalah bagaimana persiapan pemerintah daerah mensinergikan regulasi-regulasi yang ada setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Serta Permendagri 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah